

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM DAN PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Empiris di Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**RENDY YULIAN BAYU PRAKOSO
NIM. C2B006059**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rendy Yulian Bayu Prakoso
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006059
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP
BELANJA DAERAH (Studi Empiris di Kabupaten
/ Kota Propinsi Jawa Tengah)
Dosen Pembimbing : Drs. Y. Bagio Mudakir, MSP

Semarang, 22 November 2010

Dosen Pembimbing

(Drs. Y. Bagio Mudakir, MSP.)
NIP. 19540609 198103 1004

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Rendy Yulian Bayu Prakoso
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006059
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP
BELANJA DAERAH (Studi Empiris di Kabupaten
/ Kota Propinsi Jawa Tengah)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

Tim Penguji

1. Drs. Y. Bagio Mudakir, MSP. (.....)

2. Dr.Hadi Sasana, SE.,MSi (.....)

3. _Nenik Woyanti, SE.,MSi_____ (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rendy Yulian Bayu Prakoso, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah)” adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan / atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 November 2010

Yang Membuat Pernyataan,

(Rendy Yulian Bayu Prakoso)
NIM. C2B006059

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah pada kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan adanya fenomena belanja daerah yang belum optimal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Padahal Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang semakin meningkat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari 35 kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah. Data ini berupa data *cross section* selama 1 tahun. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh bahwa ada pengaruh yang positif antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah secara parsial. Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh bahwa ada pengaruh yang positif antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah secara parsial. Dan Hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara PDRB terhadap Pengalokasian Belanja Daerah secara parsial.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pendapatan asli daerah yang diperoleh kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah penting untuk ditingkatkan agar kabupaten / kota dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi karena belanja daerah untuk perkembangan wilayah yang diterimanya akan meningkat. Cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Dengan tingginya penerimaan dari PAD ini diharapkan mampu meningkatkan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah.

ABSTRACT

This research is conducted to analyze influence between original earnings of area, Public Allocation Fund and Gross Domestic Bruto to area expense at sub-province / city in Province Central Java. This Matter because of sub-province / city expense phenomenon which not yet optimal which conducted by Public Original Earnings. So, Area and Public Allocation Fund which progressively mount.

Data which is used in this research is data from 35 sub-province / city in Central Java Province. This Data in the form of section cross data during 1 year. Analyze data method which is used in this research use ordinary least square.

Result of examination of first hypothesis obtained that there is influence which is significant and positive between Original Earnings of Area to Expense Area by partial. Result of second examination obtained that there is influence which significant and positive between Public Fund Allocation to Expense Area by partial. Result of examination of third hypothesis obtained that there influence which is significant and positive between PDRB to Allocation Expense Capital by partial.

Suggestion for the research of hereinafter is original earnings of obtained by area is sub-province / city in important Province Central Java to be improved sub-province / city can experience of high economic growth relative because area expense for regional growth which accepted it will mount. Way of able to be conducted by local government for example by improving acceptance of area, area retribution and original earnings of valid other area. With acceptance height from this PAD is expected can improve area expense for the sake of society.

Keyword : Original Earnings of Area, Public Fund Allocation, Gross Domestic Regional Bruto and Expense Area.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1 Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis.
- 2 Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- 3 Drs. H. Edy Yusuf A.G.,M.Sc.,Ph.D,selaku Ketua Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Diponegoro.
- 4 Drs. R.Mulyo Hendarto.MSP, selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis dan memberikan motivasi kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

- 5 Bapak Drs. Y. Bagio Mudakir, MSP. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dengan sangat baik, penuh kesabaran, nasehat dan saran yang tulus, dan segala kemudahan dalam meluangkan waktunya untuk bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 6 Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan yang telah membukakan cakrawala ilmiah kepada penulis.
- 7 Terima kasih, yang sebesar besarnya kepada Ayah, Ibu dan saudara-saudaraku yang tidak pernah aku lupakan atas semua motivasi masukan masukan dan segala yang telah diberikan guna mendukung terselesainya skripsi ini. Terima kasih untuk semua kasih sayang, doa perhatian dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 8 Seseorang tercinta yang memberikan semangat dan dorongan.
- 9 Teman-teman di Ekonomi / IESP UNDIP yang dengan kompak memberikan bantuan, dorongan dan perhatian selama aku menempuh studi.
- 10 Terima kasih kepada *gangster hola-holo* (gatha, dody, dorani, bungaran, suryo, dipo yosi, candra dan crew dll) yang selalu mendukungku tiada henti.
- 11 Terima kasih kepada Club mobil *Random Indonesia* yang telah memberi semangat kepada penulis.

Semoga semua petunjuk, bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Semarang, 22 November 2010

Penulis

(Rendy Yulian Bayu Prakoso)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...	10
2.2. Pengeluaran Pemerintah (Belanja Pelayanan Publik)	11
2.3. Belanja Daerah.....	20

2.4. Pendapatan Asli Daerah	21
2.5. Dana Perimbangan atau Dana Transfer	24
2.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	28
2.7. Penelitian Terdahulu	30
2.8. Kerangka Pemikiran.....	34
2.9. Hipotesis	36
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Definisi operasional dan Pengukuran variable.....	38
3.2. Populasi dan Sampel penelitian	39
3.3. Jenis Data	41
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	41
3.5. Metode Analisis	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Obyek Penelitian	47
4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	51
4.3. Pengujian Asumsi Klasik.....	54
4.4. Regresi Linier Berganda	58
4.5. Koefisien Determinasi.....	59
4.6. Pengujian Hipotesis	60

4.7. Uji Hipotesis dengan Uji t.....	61
4.8. Pembahasan.....	63
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	69
5.3. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Perubahan Belanja Daerah, PAD, DAU, PDRB kabupaten/kota (Dalam Rupiah) Tahun 2004-2008	7
Tabel 2.1 : Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah.....	20
Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Dalam Rupiah) Tahun 2008.....	40
Tabel 4.1 : Data Kabupaten/Kota Penelitian	47
Tabel 4.2 : Data PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Dalam Rupiah) Tahun 2008.....	48
Tabel 4.3 : Data DAU Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Dalam Rupiah) Tahun 2008.....	49
Tabel 4.4 : Data PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Dalam Rupiah) Tahun 2008.....	50
Tabel 4.5 : Data Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah(Dalam Rupiah) Tahun 2008.....	51
Tabel 4.6 : Statistik Deskriptif.....	52

Tabel 4.7	:	Hasil Uji Multikolinieritas	54
Tabel 4.8	:	Hasil Uji Autokorelasi	55
Tabel 4.9	:	Uji Kolmogorov Smirnov (Uji Normalitas Data).....	57
Tabel 4.10	:	Hasil Koefisien Variabel	58
Tabel 4.11	:	Hasil Koefisien Determinasi	60
Tabel 4.12	:	Hasil Uji F	61
Tabel 4.13	:	Hasil Uji t	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1 : Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatter Plot	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001 merupakan kebijakan yang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah. Kebijakan ini menyebabkan setiap daerah harus mampu membiayai anggaran daerahnya. Untuk membiayai daerah anggaran ini pemerintah pusat dapat membantu dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, selain itu pemerintah daerah dapat berusaha sendiri dengan meningkatkan pajak asli daerah. (Halim & Abdullah, 2006).

Dalam UU Nomor 22 tahun 1999, dijelaskan bahwa undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fiskal, agama dan bidang lainnya. Untuk sumber pembiayaannya, UU Nomor 25 tahun 1999, sudah mengoreksi ketidakadilan selama ini dengan secara tegas akan mewujudkan

sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan tujuan memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian

daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional dan transparan. (Halim Abdul, 2001).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPR dalam proses ratifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk

kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management*. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat

investasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja daerah merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. (Halim & Abdullah, 2006).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah dalam APBD. Alokasi belanja daerah ini didasarkan pada kebutuhan

daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. (Saragih, 2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dengan demikian, penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan belanja daerah diantaranya naiknya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan produk domestik regional bruto.

Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber

ekonomi asli daerah. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

Faktor kedua yang mempengaruhi belanja daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi belanja daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan

aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Bruto / PDRB (Mudrajad Kuncoro, 2004). Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Mardiasmo, 2002).

Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004) diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah pada tahun 2001. Penelitian oleh Kusumadewi dan Rahman (2007) memperoleh bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Harianto dan Adi (2007) memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Maimunah (2006) memperoleh hasil bahwa pada tahun 2004 dan tahun 2003 Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah, sedangkan pada tahun 2004 dan tahun 2003 Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004); Kusumadewi dan Rahman (2007); Adi (2007) serta Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menganalisis tentang pengaruh dana alokasi umum dan Pendapatan

Asli Daerah terhadap belanja daerah. Motivasi dilakukannya penelitian ini karena adanya hasil penelitian yang berbeda-beda (*research gap*) dimana dari hasil penelitian Prakosa (2004); Kusumadewi dan Rahman (2007); Harianto dan Adi (2007) memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Maimunah (2006) memperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Obyek penelitian ini adalah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2008. Alasan pemilihan obyek disebabkan karena adanya fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ,Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Daerah yang tampak pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Perubahan Belanja Daerah,PAD,DAU,PDRB kabupaten/kota (Dalam Rupiah)
Tahun 2004-2008

Thn	Belanja Daerah	DAU	PAD	PDRB
2004	10.853.431.359.000	16.132.462.014.000	1.266.327.966.000	118.574.724.040.000
2005	12.941.280.597.000	17.356.548.681.000	1.436.530.357.000	123.765.649.170.000
2006	12.135.902.324.000	16.258.640.960.000	1.872.652.660.000	122.111.684.600.000
2007	22.521.330.320.000	15.897.922.960.000	2.104.268.522.000	135.317.655.140.000
2008	26.554.409.052.000	17.893.313.041.000	2.259.843.165.000	141.837.871.740.000

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa belanja di kabupaten/kota Jawa Tengah mengalami fluktuasi dimana terjadi penurunan jumlah belanja daerah pada tahun

2006, penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) terjadi pada tahun 2006 dan 2007, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mengalami peningkatan dari tahun 2004 – 2008. Untuk data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami penurunan pada tahun 2005, padahal tahun sebelumnya meningkat. Hal ini yang mengindikasikan adanya fenomena / masalah bagi pemerintah daerah dalam penetapan belanja daerah karena tidak sesuai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

1.2. Perumusan Masalah

Fenomena tersebut merupakan masalah yang perlu dikaji, melihat adanya ketidaksesuaian dan fluktuasi naik turunnya belanja daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dimana terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tetapi Belanja Daerahnya mengalami penurunan.

Pemerintah daerah mengharapkan belanja daerah dapat dibelanjakan dengan optimal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ,dan diharapkan mampu menurunkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan masyarakatnya melalui perluasan lapangan kerja dll.Perubahan jumlah belanja daerah akan memberikan dampak pada perubahan alokasi dana kepada masyarakat. Dari pernyataan di atas, maka penelitian ini diberi judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH , DANA ALOKASI UMUM DAN PRODUK

DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Empiris di Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah)”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah pada kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk menganalisis antara lain :

1. Menyediakan informasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dalam beberapa hal yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan produk domestik regional bruto dalam memprediksi belanja daerah.
2. Menyediakan informasi bagi para peneliti untuk menambah kepustakaan karya ilmiah, serta memberikan informasi tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah.
3. Memberikan informasi yang dapat dijadikan masukan, terutama bagi pihak pihak yang terkait dan berkepentingan dengan masalah yang diteliti yaitu

tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan produk domestik regional bruto dalam memprediksi belanja daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan organisasi pada suatu periode yang dinyatakan dalam satuan moneter. APBD merupakan suatu alokasi penerimaan dan pengeluaran sebagai perencanaan pembangunan dengan mengkoordinasikan semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Anggaran Daerah mempunyai peran penting yaitu sebagai pedoman dan panduan dalam pembangunan Pemerintah Daerah yang mencerminkan kebutuhan masyarakat daerah. APBD merupakan anggaran sektor publik yang harus diinformasikan untuk mendapatkan masukan dan kritikan dari anggota DPRD yang merupakan wakil dari masyarakat (Ghozali dan Ratmono 2008).

Anggaran sektor publik tidak boleh dirahasiakan karena pelaksanaan kegiatannya didanai dengan uang publik yang dibayar melalui pajak dan restribusi daerah. Pemerintah Daerah (*Local Government*) dapat dimasukkan dalam katagori organisasi Type B non Profit karena Pemerintah Daerah memperoleh pendapatan dari pajak, grant, dan pinjaman (Ghozali dan Ratmono 2008). Oleh karena itu dana-dana publik tersebut harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dan diketahui oleh masyarakat luas. Dalam Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyusun keuangan daerah yang terdiri atas Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah.

Tujuan utama dari proses perumusan anggaran adalah menerjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan nama penganggaran. Penganggaran sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik, maka penganggaran merupakan suatu proses politik (Mardiasmo, 2002)

Struktur keuangan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain lain Penerimaan Daerah yang Sah. Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat digambarkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber keuangan daerah utama dan dapat digali secara terus menerus oleh Pemda. Dengan demikian peran PAD diharapkan dapat meningkat sehingga peran pinjaman daerah dapat dikurangi atau diturunkan dari sumber penerimaan daerah.

2.2. Pengeluaran Pemerintah (Belanja Pelayanan Publik)

2.2.1. Konsepsi Pengeluaran Pemerintah (Belanja Pelayanan Publik)

Mangkoesebroto (1997) menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan pilihan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Teori pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro pengeluaran pemerintah yang menjelaskan pola waktu pengeluaran pemerintah dengan variabel agregat, seperti produk domestik bruto, tingkat inflasi dan teori mikro pengeluaran pemerintah yang menjelaskan dasar mikro ekonomi proses keputusan yang meningkatkan pengeluaran pemerintah (Mangkoesebroto, 1997). Ada tiga model teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah dan teori Peacock & Wiseman sebagai berikut :

1. Model Pembangunan Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi dibedakan menjadi tahap awal, menengah dan lanjut. Pada tahap awal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, investor sektor

publik menyediakan infrastruktur sosial seperti : jalan, belanja bidang kesehatan dan belanja bidang pendidikan, yang mendorong ekonomi ke tahap menengah. Dalam tahap menengah, investasi publik diikuti dengan pertumbuhan investasi swasta. Kegagalan pasar terjadi di semua tahap, sehingga keterlibatan pemerintah terus meningkat untuk mengatasi kegagalan tersebut.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap *Gross National Product* (GNP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) semakin besar dan prosentase pemerintah semakin kecil. Menurut Rostow, pada tahap lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari pengeluaran infrastruktur untuk penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program pendidikan, program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Pendapat Magrave dan Rostow menjelaskan perubahan pengeluaran pemerintah dan variasi pelayanan publik dalam siklus pembangunan.

2. Hukum Wagner

Hukum Wagner menjelaskan mengenai bagian Produk Domestik Regional Bruto yang diambil sektor publik. Hukum ini terkait dengan pertumbuhan ukuran relatif sektor publik, yaitu jika pendapatan perkapita dalam ekonomi bertambah, maka ukuran sektor publik juga bertambah. Pernyataan

Wagner tersebut bersifat empiris berdasarkan hasil pengamatan pertumbuhan sektor publik di sejumlah negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19, yang menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi rasio pengeluaran publik terhadap PDB adalah faktor politik dan ekonomi. Menurut Wagner, ketika ekonomi menjadi industri, hubungan antar pasar dan agen dalam pasar semakin kompleks yang memerlukan peraturan perdagangan dan sistem kehakiman untuk mengaturnya. Eksternalitas akibat urbanisasi membutuhkan intervensi dan peraturan sektor publik.

Dalam pertumbuhan pengeluaran publik untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dijelaskan Wagner berdasarkan elastisitas pendapatan permintaan, bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan riil per kapita naik, maka pengeluaran publik meningkat terhadap layanan tersebut dan akan meningkatkan rasio pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto. Model Wagner tidak mengandung teori pilihan publik, tetapi menggunakan teori negara organik yaitu negara dianggap individu dan pembuat keputusan secara independen dari anggota masyarakat.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Studi Peacock dan Wiseman merupakan analisis “pola waktu” pengeluaran publik. Dasar analisisnya adalah teori politik penentuan pengeluaran publik, yaitu pemerintah senang mengeluarkan banyak uang, rakyat tidak suka bayar pajak, dan pemerintah harus memperhatikan keinginan rakyat.

Peacock dan Wiseman mengemukakan teori yang didasarkan pada pandangan masyarakat bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar tersebut. Masyarakat mempunyai suatu toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai aktivitas pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah, sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Inti dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat, walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dalam pengeluaran pemerintah.

Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Oleh sebab itu, penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak, sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan tersebut disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu bahwa adanya suatu gangguan sosial akan menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada

aktivitas pemerintah. Selain itu, banyaknya aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang disebut dengan efek inspeksi (*inspection effect*). Di samping itu, adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta (*concentration effect*). Adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak turun kembali pada tingkat sebelum terjadinya perang.

Hipotesis yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman mendapat kritikan dari Bird yang menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke aktivitas yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah dalam persentasenya terhadap PDB. Akan tetapi, setelah terjadinya gangguan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB perlahan-lahan akan menurun kembali pada tingkat sebelum terjadinya gangguan. Jadi menurut Bird, efek pengalihan hanya gejala dalam jangka pendek dan tidak terjadi dalam jangka panjang.

Ketiga model teori makro pengeluaran pemerintah tersebut tidak dapat menjelaskan proses pengeluaran pemerintah secara rinci sebagaimana teori mikro pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang

menimbulkan permintaan akan barang pemerintah (barang yang disediakan oleh pemerintah) dan menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut atas tersedianya barang pemerintah. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang pemerintah menentukan jumlah barang pemerintah yang akan disediakan melalui anggaran belanja, dan ini akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Jadi, perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor yaitu : perubahan permintaan akan barang publik, perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, perubahan kualitas barang publik dan perubahan harga faktor-faktor produksi.

Soeparmoko (1987) mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah menjadi lima jenis yaitu :

- a. Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa atau barang bersangkutan, misalnya pengeluaran untuk jasa perusahaan.
- b. Pengeluaran yang produktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang berpengaruh positif terhadap penerimaan pemerintah, misalnya pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan.

- c. Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya obyek pariwisata.
- d. Pengeluaran yang secara tidak langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan/perang meskipun saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangnya akan naik.
- e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dijalankan sekarang, maka kebutuhan pemeliharaan tersebut akan menjadi lebih besar di masa yang akan datang.

2.2.2. Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (Belanja Pelayanan Publik)

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999, Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 25 tahun 1999. Undang-undang No. 33 tahun 2004, implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan suatu langkah dalam mewujudkan peran birokrasi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik masyarakat daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan (masyarakat), maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kep. Menpan No. 63/KEP/M.PAN/2003). Komponen-

komponen yang harus ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain adalah : penyelenggara pelayanan, unit pelayanan, pemberi pelayanan, penerima pelayanan, dan biaya pelayanan. Adapun penyelenggara pelayanan publik adalah instansi/dinas pemerintah yang memberikan pelayanan publik, seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi / dinas pemerintah yang secara langsung dan tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai pada instansi/dinas pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga/instansi pemerintah dan dunia usaha yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan belanja pelayanan publik merupakan belanja yang dipergunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah mencakup seluruh bidang kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, agaman, moneter dan fiskal.

Untuk dapat mensinergikan kebutuhan pelayanan publik masyarakat daerah, maka terdapat tiga hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik yaitu :

1. Dimensi ekonomi, akan dipengaruhi oleh pemahaman bahwa pelayanan publik menjadi leading bagi pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Dimensi pemerintahan, akan dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah yang semakin kuat dalam penyediaan layanan publik.
3. Dimensi politik, mengarah pada penerapan demokratisasi yang menerapkan keterwakilan masyarakat sehingga perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan telah menetapkan kebijakan sesuai dengan mekanisme demokrasi.

Penerapan alokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum mengalami perubahan konsep, dimana pada tahun 2002 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 dan 6 tahun 1975, pada tahun 2003 mengacu pada PP. No. 105 dan 108 tahun 2000 dan mulai tahun 2007 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah

PP. No. 5 & 6 Tahun 1975	PP. No. 105 & 108 Tahun 2000	Permendagri No. 13 Tahun 2006
1. Belanja Rutin - Belanja pegawai - Belanja barang - Belanja pemeliharaan - Belanja perjalanan dinas - Belanja lain-lain - Angsuran pinjaman/utang dan bunga - Belanja pensiun - Ganjaran / subsidi - Pengeluaran tidak termasuk bagian lain - Pengeluaran tidak tersangka 2. Belanja Pembangunan (Belanja Modal)	1. Belanja Aparatur - Administrasi umum (pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan) - Operasi dan pemeliharaan (pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan) - Belanja modal 2. Belanja Pelayanan Publik -Administrasi umum (pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan) -Operasi dan pemeliharaan (pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan) -Belanja Modal 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4. Belanja Tidak Tersangka	1. Belanja Tidak Langsung - Belanja pegawai - Bunga - Subsidi - Hibah - Bantuan sosial - Belanja bagi hasil - Bantuan keuangan - Belanja tidak terduga 2. Belanja Langsung : - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal

2.3. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya, struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang masing-masing secara tegas harus dicantumkan bersamaan dengan jumlah anggarannya dan realisasi anggaran periode sebelumnya. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja

langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (*Badan Pusat Statistik, 2010*).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 belanja modal didefinisikan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Subiyanto dan Halim, 2008).

Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Kawedar dkk., 2008).

2.4. Pendapatan Asli Daerah

2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan. Sedangkan pengertian dari Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi beberapa jenis yaitu :
(Halim, Abdul 2001)

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Penerimaan dari sektor pajak ini antara lain : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air bawah tanah dan pajak air permukaan. (dalam rupiah).

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Penerimaan ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek kendaraan penumpang, retribusi air, retribusi jembatan timbang, retribusi kelebihan muatan dan retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian. (dalam rupiah).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. (dalam rupiah).

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro.(dalam rupiah).

2.4.2. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

Adapun jenis pajak kabupaten/kota menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000,tentang perubahan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 2 ayat (2) terdiri dari:pajak hotel,pajak restoran,pajak hiburan,pajak reklame,pajak penerangan jalan,pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.Pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan.Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional

dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat besar. semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka belanja daerah juga semakin besar, jika Pendapatan Asli Daerah rendah maka belanja daerah juga akan rendah (Halim, Abdul 2001).

2.5. Dana Perimbangan atau Dana Transfer

2.5.1. Pengertian Dana Perimbangan atau Dana Transfer

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan public antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim 2003). Dana Perimbangan dipisahkan menjadi empat jenis yaitu:

1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Bagi Hasil sebagaimana pasal Pasal 11 UU No. 33/2004

- a. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- c. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
- 1) Kehutanan;
 - 2) Pertambangan umum;
 - 3) Perikanan;
 - 4) Pertambangan minyak bumi;
 - 5) Pertambangan gas bumi; dan
 - 6) Pertambangan panas bumi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 pasal 29 Proporsi DAU antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangen kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Dana Alokasi Umum (DAU) atau disebut transfer atau block grant dari pempus penting untuk pemda dalam menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan

public minimum diseluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002) Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar-daerah, dan mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah.mengatasi persoalan efek pelayanan public antar-daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim 2003).

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN.

4. Dana Perimbangan dari Provinsi

Dalam UU no 32/2004 maupun UU No 33/2004 tidak ada pasal yang secara tegas menetapkan aturan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal yang mendasari adalah Peraturan Daerah yang dibenarkan dalam ke Undang Undang tersebut untuk mengatur adanya Dana Perimbangan, Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.(Abdulah dan Halim 2003)

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU no 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. (Abdulah & Halim 2003)

2.5.2. Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang

lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah.(Abdullah & Halim 2003).

Pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) kepada setiap daerah didasarkan pada besar kecilnya bobot masing masing daerah. Jika bobot suatu daerah besar, maka DAU yang akan diterimanya besar, tetapi sebaliknya, bila bobot suatu daerah kecil, maka DAU yang akan diperolehnya juga kecil. Hal ini dikarenakan perhitungannya, nilai bobot dikalikan dengan penerimaan dalam negeri (PDN) atau yang di alokasikan dalam APBN untuk DAU pada tahun bersangkutan.(Halim, Abdul. 2001).

2.6. Produk Domestik Regional Bruto

2.6.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Penghitungan produk domestik ini lebih dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah pada satuan waktu tertentu (Kuncoro, 2004).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun (Kuncoro, 2004). Secara konsep, estimasi penghitungan nilai PDRB menggunakan pendekatan atas dasar harga berlaku (*at current price*), dan atas dasar harga konstan (*at constan price*). Baik PDRB harga berlaku maupun harga konstan masing-masing mempunyai interpretasi data yang berbeda (Kuncoro, 2004).

PDRB atas dasar harga berlaku adalah penghitungan PDRB berdasarkan harga tahun berjalan atau harga yang berlaku pada setiap tahun penghitungan dengan masih adanya faktor inflasi di dalamnya. PDRB atas dasar harga konstan adalah penghitungan PDRB berdasarkan harga tetap atau konstan pada tahun tertentu dengan mengabaikan faktor inflasi. PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi (Kuncoro, 2004).

2.6.2. Hubungan PDRB terhadap Belanja Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan produk domestik regional bruto adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB (Kuncoro, 2004).

Hasil penelitian yang dilakukan (Lin dan Liu,2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah.Yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi.(Oates,1995). Hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.Secara teori, semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh kabupaten / kota. Dengan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah pusat akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik. (Lin dan Liu,2000;Mardiasmo,2002;Wong,2004).

2.7.Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini dengan ini dilakukan dilakukan oleh Prakosa (2004), Kusumadewi dan Rahman (2007),

Harianto dan Adi (2007), Maimunah (2006), Darwanto dan Yustikasari (2007), dan Adi (2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004) dengan judul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). Variabel bebas terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel terikatnya yaitu Belanja Daerah. Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier dengan menggunakan periode penelitian tahun 2000 - 2002. Hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah pada tahun 2001.

Kusumadewi dan Rahman (2007) dengan judul penelitian Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di Indonesia. Variabel bebas terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel terikatnya yaitu Belanja Daerah. Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier dengan menggunakan periode penelitian tahun 2001-2004. Hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah.

Harianto dan Adi (2007) dengan judul Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per kapita.

Variabel bebas terdiri dari Dana alokasi umum, Belanja modal, Pendapatan asli daerah, sedangkan variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per kapita. Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier dengan menggunakan periode penelitian tahun 2001-2004. Hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah.

Maimunah (2006) dengan judul penelitian *flypapper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah Pada Kabupaten / Kota di Pulau Sumatera. Variabel bebas penelitian terdiri dari DAU dan PAD, sedangkan variabel terikatnya adalah belanja daerah. Hasil penelitian diperoleh bahwa pada tahun 2004 dan tahun 2003 Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah, sedangkan pada tahun 2004 dan tahun 2003 Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Darwanto dan Yustikasari (2007) dengan judul *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se Jawa-Bali baik kabupaten dan kota dari tahun 2004–2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengujian secara parsial yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja

modal antara lain Pendapatan Asli Daerah dan dana alokasi umum. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Adi (2006) dengan judul Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se-Jawa Bali). Hasil penelitian diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD; Belanja pembangunan memberikan dampak positif terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat dibuat tabel penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, tahun, Judul	Variabel bebas dan variabel terikat	Alat Analisis dan Periode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Prakosa (2004) dengan judul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY).	Variabel bebas terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Variabel terikatnya yaitu Belanja Daerah.	Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier dengan menggunakan periode penelitian tahun 2000 - 2002.	Hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah pada tahun 2001.
2.	Kusumadewi dan Rahman (2007) dengan judul penelitian Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di Indonesia.	Variabel bebas terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Variabel terikatnya yaitu Belanja Daerah.	Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier dengan menggunakan periode penelitian tahun 2001 - 2004.	Hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah.
3.	Harianto dan Adi (2007) dengan judul Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Per Kapita.	Variabel bebas terdiri dari Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Per Kapita.	Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier dengan menggunakan periode penelitian tahun 2001 - 2004.	Hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah.
4.	Maimunah (2006) dengan judul penelitian Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota di Pulau Sumatera.	Variabel bebas penelitian terdiri dari DAU dan PAD. Variabel terikatnya adalah belanja daerah.	Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier dengan menggunakan periode penelitian tahun 2003 - 2004.	Hasil penelitian diperoleh bahwa pada tahun 2004 dan tahun 2003 Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah, sedangkan pada tahun 2004 dan tahun 2003 Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
5.	Darwanto dan Yustikasari (2007) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.	Variabel bebas penelitian terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum. Variabel terikatnya adalah Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.	Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se Jawa-Bali baik kabupaten dan kota dari tahun 2004 -	Hasil penelitian diperoleh bahwa pengujian secara parsial yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana alokasi umum. Sedangkan

			2005 dengan alasan ketersediaan data.	pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
6.	Adi (2006) dengan judul Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Pada Kabupaten dan Kota se-Jawa Bali).	Variabel bebas penelitian terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Variabel terikatnya adalah Pendapatan Asli Daerah.	Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se Jawa-Bali baik kabupaten dan kota dari tahun 1998 – 2000.	Hasil penelitian diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD; Belanja pembangunan memberikan dampak positif terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi.

2.8.Kerangka Pemikiran

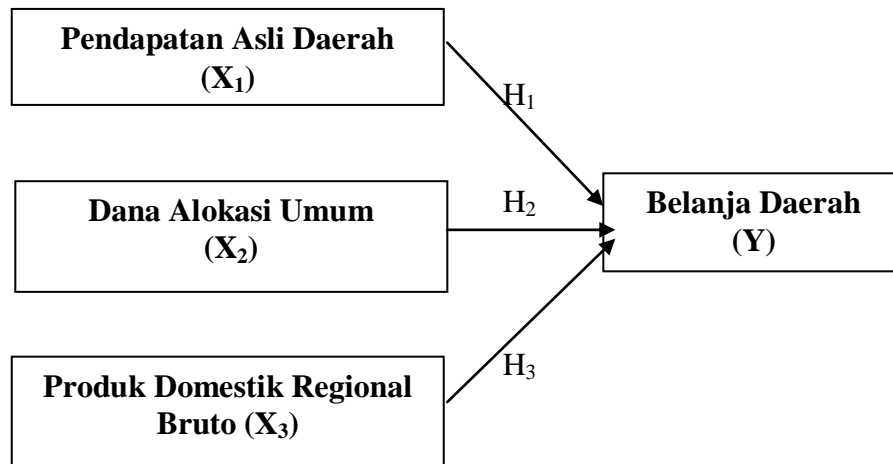
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004), Kusumadewi dan Rahman (2007), Harianto dan Adi (2007) dan Adi (2006) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004), Kusumadewi dan Rahman (2007), Harianto dan Adi (2007), Maimunah (2006) serta Darwanto dan Yustikasari (2007) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan produk domestik regional bruto adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB (Saragih, 2003; Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Lin dan Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi

daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002a; Wong, 2004). Secara teori, semakin besar pendapatan domestik regional bruto maka akan semakin besar pula pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Sebaliknya, semakin kecil produk domestik regional bruto maka akan semakin kecil pula pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) menemukan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menemukan bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Prakosa, 2004 serta Darwanto dan Yustikasari, 2007 dan Adi,2006

2.9.Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis 1. Ada pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

Belanja Daerah di kabupaten / kota Propinsi Jawa Tengah.

Hipotesis 2. Ada pengaruh positif antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap

Belanja Daerah di kabupaten / kota Propinsi Jawa Tengah.

Hipotesis 3. Ada pengaruh positif antara Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) terhadap Belanja Daerah di kabupaten / kota Propinsi Jawa

Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Untuk memudahkan pemahaman tentang variable yang diteliti, perlu penegasan dan penjelasan mengenai definisi operasional variabel yang digunakan antara lain :

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang mendasari penelitian, variabel dependen atau variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dapat dilambangkan dalam Y, Yang menjadi Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (dalam rupiah).

3.1.2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel bebas yang menggambarkan tujuan penelitian. Membentuk variabel dependen. Variabel independen dapat ditulis dalam

X. Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan realisasi penerimaan asli daerah yaitu : pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.(dalam rupiah).

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) atau transfer adalah dana dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai pelayanan dasar pemerintah kabupaten/kota.(dalam rupiah).

c. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Data produk domestik regional bruto (PDRB) diambil dari data PDRB tahunan yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik periode tahun 2008. Pada penelitian ini menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, karena PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara riil di suatu daerah dengan mengabaikan laju inflasi (Kuncoro, 2004).(dalam rupiah).

3.2 Populasi dan Sampel penelitian

Adapun cakupan penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dengan tahun penelitian yaitu tahun 2008 penelitian ini merujuk pada penelitian oleh Ikin Solikin tahun 2007.

Tabel 3.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Dalam Rupiah) 2008

NO	KABUPATEN/KOTA	PAD	Dana Alokasi Umum	PDRB	Belanja Daerah
1	Kab. Banjarnegara	46.521.397.000	488.707.563.000	2.619.989.610.000	716.235.932.000
2	Kab. Banyumas	89.086.275.000	702.152.351.000	4.172.781.990.000	1.046.090.592.000
3	Kab. Batang	41.192.714.868	401.575.000.000	2.169.854.550.000	592.129.332.000
4	Kab. Blora	48.954.141.000	478.260.120.000	1.913.763.350.000	767.524.042.000
5	Kab. Boyolali	63.733.408.000	582.512.205.000	3.899.372.860.000	793.262.108.000
6	Kab. Brebes	71.896.767.000	716.426.000.000	4.998.528.190.000	973.150.247.000
7	Kab. Cilacap	102.780.341.000	773.078.652.000	11.689.092.900.000	1.172.492.785.000
8	Kab. Demak	43.817.076.000	483.239.311.000	2.787.524.020.000	690.803.050.000
9	Kab. Grobogan	66.232.767.000	615.030.004.000	2.948.793.800.000	831.040.473.000
10	Kab. Jepara	70.427.233.000	505.641.495.000	3.889.988.850.000	744.074.360.000
11	Kab. Karanganyar	64.470.676.000	506.156.445.000	4.921.454.710.000	772.834.364.000
12	Kab. Kebumen	58.599.425.000	616.395.049.000	2.716.236.740.000	841.237.993.000
13	Kab. Kendal	71.685.167.000	490.895.234.000	4.806.891.860.000	756.328.877.000
14	Kab. Klaten	49.772.711.000	744.676.781.000	4.567.200.960.000	1.000.357.887.000
15	Kab. Kudus	56.440.909.000	460.540.860.000	11.659.252.200.000	729.759.651.000
16	Kab. Magelang	78.119.511.000	588.001.786.000	3.761.388.590.000	853.627.225.000
17	Kab. Pati	80.677.766.091	603.264.393.000	4.162.082.370.000	900.119.171.674
18	Kab. Pekalongan	50.136.941.000	465.324.091.000	2.970.146.740.000	641.376.169.000
19	Kab. Pemasleng	66.747.479.000	577.864.687.000	3.142.808.700.000	767.167.956.000
20	Kab. Purbalingga	63.795.294.000	545.954.837.000	2.257.392.770.000	707.774.473.000
21	Kab. Purworejo	42.874.970.000	515.796.414.000	2.737.087.130.000	773.315.115.000
22	Kab. Rembang	51.125.558.000	398.411.000.000	2.093.412.590.000	592.524.623.000
23	Kab. Semarang	82.942.881.000	491.166.067.000	5.079.003.740.000	794.396.381.000
24	Kab. Sragen	54.012.383.000	551.265.965.000	2.729.450.320.000	802.642.142.000
25	Kab. Sukoharjo	41.898.320.000	498.936.000.000	4.540.751.530.000	717.122.974.000
26	Kab. Tegal	59.370.632.183	606.452.000.000	3.286.263.440.000	872.732.363.385
27	Kab. Temanggung	37.773.970.000	421.056.329.000	2.219.155.630.000	611.340.692.000
28	Kab. Wonogiri	54.129.295.000	598.932.854.000	2.770.435.780.000	846.335.488.078
29	Kab. Wonosobo	31.512.540.000	427.667.185.000	1.741.148.310.000	616.367.928.000
30	Kota Magelang	40.549.584.000	256.525.338.000	993.863.810.000	386.124.525.000
31	Kota Pekalongan	30.098.047.000	264.051.790.000	1.887.853.700.000	397.144.017.604
32	Kota Salatiga	7.995.573.000	225.384.715.000	832.154.880.000	368.393.612.000
33	Kota Semarang	267.914.250.000	634.864.459.000	19.156.814.300.000	1.325.301.609.000
34	Kota Surakarta	102.989.919.000	420.911.721.000	4.549.342.950.000	760.080.852.000
35	Kota Tegal	69.567.244.000	236.194.340.000	1.166.587.870.000	393.200.044.000

Sumber data: Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui publikasi. Data sekunder yang digunakan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. Di samping itu, juga diperlukan studi pustaka untuk memperoleh literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, metode ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan menganalisis informasi yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau bentuk-bentuk lain. Data diperoleh dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

3.5 Metode Analisis

Persamaan Regresi Linier

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) maka penelitian ini menggunakan alat analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$BD = a + b_1 \cdot PAD + b_2 \cdot DAU + b_3 \cdot PDRB + e \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan:

BD = Belanja Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

e_{it} = komponen error dalam model penelitian

a = intercept

b_1, b_2, b_3 = slope

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikoleniaritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Berdasarkan hasil analisis ,jika vriabel-variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 10% dan memiliki nilai variance inflation factor (VIF) kurang dari 10, maka model regresi tersebut bebas dari masalah multikoleniaritas (Ghozali, 2005).

2. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan-

kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin -Watson (DW Test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2005)

- a. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan ($4-du$) maka koefisien autokorelasi sama dengan 0 berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau lower bound (dl), maka koefisien autokorelasi lebih dari pada 0, berarti ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW lebih dari pada ($4-dl$), maka koefisien outokorelasi lebih kecil dari pada 0, berarti ada autokorelasi negatif.
- d. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara ($4-du$) dan (dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas digunakan grafik scatter plot yaitu dengan melihat pola-pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi - Y

sesungguhnya). Dasar pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit). Maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Pengujian Normalitas

Pengujian distribusi data bertujuan untuk pengujian suatu data penelitian apakah dalam model statistik, variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Distribusi data normal menggunakan statistik parametrik sebagai alat pengujian. Sedangkan distribusi tidak normal digunakan untuk analisis pengujian statistik non parametrik. Untuk mengetahui distribusi data suatu penelitian, salah satu alat yang digunakan adalah menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Menurut Ghozali (2005), bahwa distribusi data dapat dilihat dengan membandingkan Z hitung dengan Z tabel dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika $Z_{hitung} (Kolmogorov\ Smirnov) < Z_{tabel} (1,96)$, atau angka signifikansi $>$ taraf signifikansi (α) 0,05; maka distribusi data dikatakan normal.
2. Jika $Z_{hitung} (Kolmogorov\ Smirnov) > Z_{tabel} (1,96)$, atau angka signifikansi $<$ taraf signifikansi (α) 0,05 distribusi data dikatakan tidak normal.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menunjukkan besarnya perubahan yang tersaji diakibatkan oleh variabel lainnya. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase besarnya keterkaitan antara variabel independent (X) terhadap variabel dependennya (Y). Koefisien determinasi dinyatakan dalam R^2 . Untuk variabel bebas yang lebih dari satu variabel, maka menggunakan adjusted R^2 (Ghozali, Imam 2005).

Uji Hipotesis

1. Uji t (pengujian secara parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh positif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).

$H_0 : \beta > 0$, berarti ada pengaruh positif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

Jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak berarti ada pengaruh yang positif signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).

Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_o diterima dan H_a ditolak berarti tidak ada pengaruh yang positif signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).

2. Uji F (pengujian secara simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_o : \beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).

$H_o : \beta > 0$, berarti ada hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak berarti ada variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_o diterima dan H_a ditolak berarti variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel dependen.